

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Trunojoyo Nomor 141 Sumenep ☎ (0328) 662 203 – 662 128



RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)
TAHUN 2016 - 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 dapat diselesaikan.

Diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pemberdayaan Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Sosial Masyarakat dan Pembangunan bidang IPOLEKSOSBUD secara terpadu dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait serta masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan, demokratis, partisipatif, harmonis, berkeadilan dan beradab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam rangka pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep dalam menumbuhkan kehidupan politik dan kemasyarakatan yang demokratis dan transparan yang berbasis pada partisipasi aktif, kreatif, dan kemandirian masyarakat dengan dasar moral dan hukum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumenep, April 2016

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMENEP



MOLLI KAPRAWI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19581215 198003 1 015

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN OPD.....	6
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	6
2.2.	Sumber Daya OPD	7
2.3.	Kinerja Pelayanan OPD	9
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD ...	13
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD	16
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	16
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih	17
3.3.	Telaahan Renstra OPD Provinsi/Kabupaten	19
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	21
3.5.	Penentuan isu-isu Strategis	21
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	23
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	23
4.2.	Strategi dan Kebijakan OPD	24
BAB V	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	25
5.1.	Rencana Program dan Kegiatan	25
5.2.	Indikator Kinerja	27
5.3.	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	27
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTRA PENDANAAN	
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	28
BAB VIII	PENUTUP	29
	Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Dalam proses penyusunan dokumen renstra, SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan isu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari eksternal.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Sumenep yaitu Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional maka penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sumenep harus dijalankan sebaik-baiknya dengan prinsip Good Governance yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi,

kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan efisiensi, efektifitas serta profesionalisme.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, maka penyusunan Renstra ini sangat penting sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sedangkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep ini menggambarkan visi, misi, tujuan, program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahunan maupun lima tahunan dan dalam penyusunannya diperlukan sumber-sumber yang meliputi : kebijakan pemerintah Pusat, Kebijakan pemerintah propinsi, kebijakan pemerintah daerah, aspirasi masyarakat, perkembangan situasi global, regional maupun daerah, kinerja masa kini serta kondisi yang diinginkan dimasa yang akan datang. Sehingga diharapkan dalam penyusunan Rencana Strategis ini akan diperoleh suatu kegiatan yang partisipasif, transparan, komprehensif dan akuntabel mengingat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep sebagai salah satu lembaga perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.2. **Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMN) 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana pembangunan jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep tahun 2016 – 2021 disusun dengan maksud

adalah sebagai pedoman dan arahan untuk melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dalam menjalankan amanah visi, misi dan/atau RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan di susunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep adalah :

1. Mengarahkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep
2. Menjamin konsistensi program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
3. Sebagai alat pengukuran kinerja SKPD dalam pencapaian target yang diformulakan dalam indikator keberhasilan

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, landasan hukum, kedudukan dan peranan Renstra dalam perencanaan daerah, dan maksud dan tujuan disusunnya Renstra.

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMENEP

Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, INDIKASI KEGIATAN, DANA INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

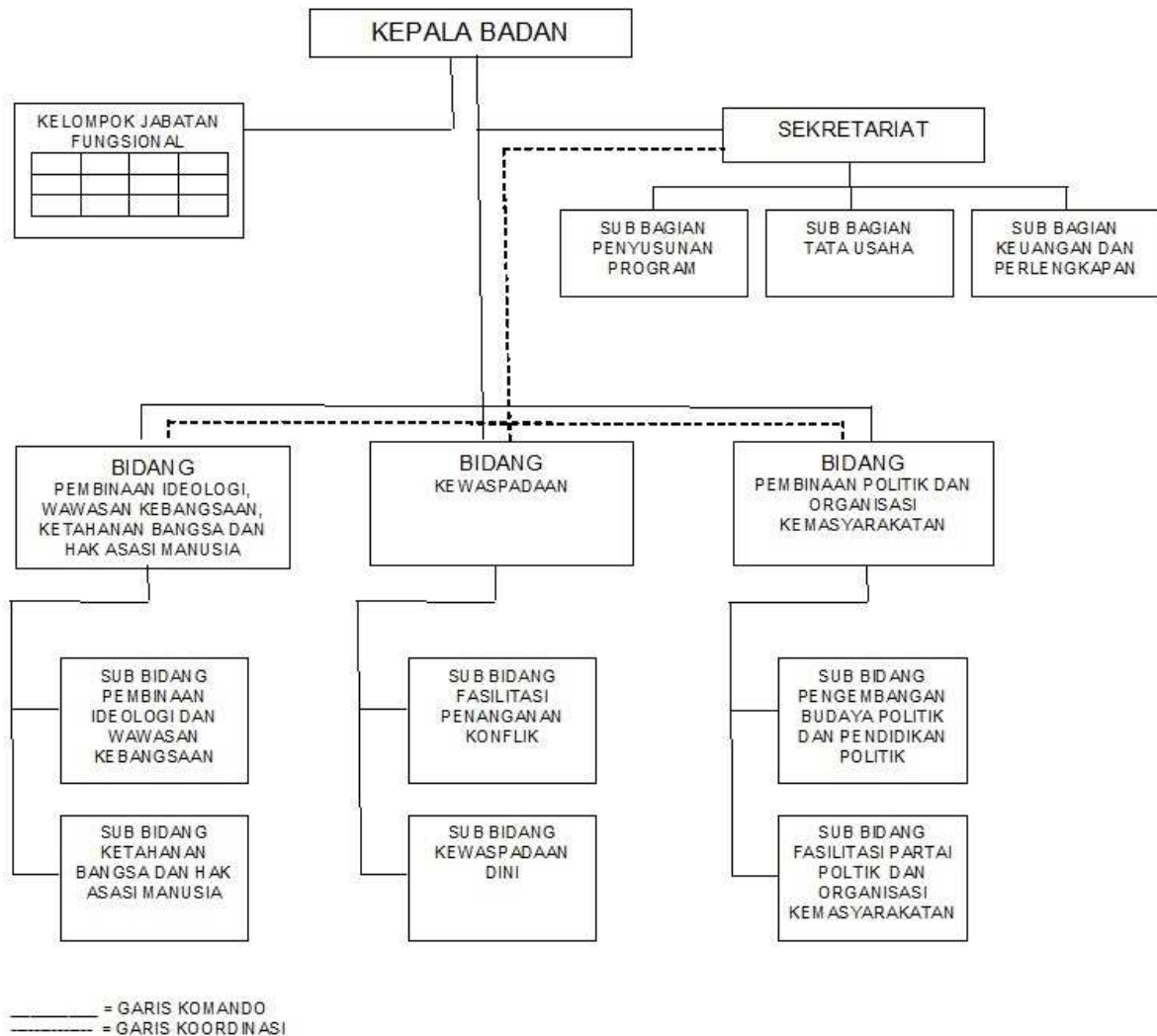
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan kewenangan bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan, perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan strategis pembangunan kesatuan bangsa dan politik
2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya serta penanganan konflik sosial guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI



2.2. Sumber Daya SKPD

A. Susunan Kepegawaian

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital didalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Terkait hal tersebut di atas, berikut ini susunan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep berdasarkan kulaifikasi pendidikan :

Tabel 2.2.1
Kualifikasi Pendidikan PNS

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	S-2	4	1	5
2	S-1	7	2	9
3	D-3	1	-	1
4	SMA	33	1	34
5	SMP	1	-	1
JUMLAH		46	4	50

Dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh PNS, merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep dalam menyikapi permasalahan kebangsaan dengan dibantu oleh tenaga PHL/Outsourcing sebanyak 42 orang.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1) Gedung dan Fasilitas

Gedung kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep terletak di jalan Trunojoyo Nomor 141 Sumenep dan merupakan aset gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Adapun gedung ini terbagi atas :

- a. Halaman
- b. Ruang lobi
- c. Ruang Kepala Badan
- d. Ruang Sekretariat
- e. Ruang Bidang
- f. Ruang Rapat
- g. Areal parkir
- h. Mushola
- i. Kamar Mandi
- j. Gudang

2) Peralatan dan kendaraan operasional

Tabel 2.2.2
Peralatan dan kendaraan operasional

No	Peralatan dan Mesin	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Mobil Dinas	4	Unit	1 Baik, 3 RB
2	Sepeda Motor	16	Unit	4 Baik, 3 RB, 9 RT
3	Lemari	16	Unit	16 Baik
4	Kulkas	6	Unit	6 Baik
6	Filling Kabinet	5	Unit	5 RB
7	Brankas	1	Unit	1 Baik
8	Meja	17	Unit	17 Baik
9	Kursi	143	Unit	54 Baik, 71 RB, 18 RT
10	AC	10	Unit	5 Baik, 5 RB
11	TV	7	Unit	4 Baik, 3 RB
12	UPS	5	Unit	5 RB
13	Komputer	11	Unit	6 Baik, 5 RB
14	Printer	12	Unit	8 Baik, 4 RB
15	Laptop	4	Unit	2 Baik, 2 RB
16	Kamera	5	Unit	2 Baik, 3 RB
17	Handytalky	5	Unit	5 Baik
18	Screen proyektor	1	Unit	1 Baik
19	LCD Proyektor	1	Unit	1 Baik
20	Faximili	1	Unit	1 Baik

Dengan sarana operasional dan pendukung yang kurang memadai merupakan kelemahan bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep setiap tahun melakukan pengadaan perlengkapan perkantoran untuk mengganti yang telah rusak berat (RB) atau bahkan rusak total (RT) dengan ketersediaan anggaran yang ada.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep meliputi : layanan rekomendasi penelitian/survey dan praktek kerja lapangan (PKL) dan Layanan penerbitan surat keterangan terdaftar untuk lembaga/ormas. Masing-masing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Layanan rekomendasi penelitian/survey dan Praktek Kerja Lapangan. Layanan rekomendasi penelitian/survey dan praktek kerja lapangan (PKL) yang merupakan salah satu bagian layanan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep telah diuraikan sebagaimana pada table berikut ini :

Tabel 2.3.1
Jumlah Rekomendasi Penelitian/Survey dan Praktek kerja Lapangan

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rekomendasi penelitian/survey dan Praktek Kerja Lapangan	373	387	214	396	593

- b. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar untuk Lembaga/ormas

Tabel 2.3.2
Tabel Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar untuk Ormas/LSM

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SKT Ormas/LSM	54	63	67	75	80

Tabel 2.3.3
Pencapaian kinerja pelayanan SKPD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep
Tahun 2011 s/d 2015

INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA TAHUN 2011		REALISASI KINERJA TAHUN 2012		REALISASI KINERJA TAHUN 2013		REALISASI KINERJA TAHUN 2014		REALISASI KINERJA TAHUN 2015		% CAPAIAN KINERJA
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	5 kali	5 kali	3 kali	3 kali	100
2	Kegiatan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Parpol	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	100
3	Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Ormas dan LSM	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	10 bulan	10 bulan	100
4	Dukungan Kelancaran Pemilu	-	-	-	-	6 bulan	6 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	100
5	Kegiatan Pembinaan Politik daerah	-	-	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100

Tabel 2.3.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep
 Tahun 2011 s/d 2015

URAIAN		TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.807.690.811	2.689.569.262	2.637.793.820	2.582.984.577	2.740.035.358	2.629.954.143	2.851.085.011	2.812.327.555	3.038.995.747	2.995.976.510
2	BELANJA LANGSUNG	1.195.114.450	1.069.502.407	2.755.532.600	2.705.115.973	3.491.919.000	3.454.318.890	4.663.140.500	4.625.578.652	3.080.802.600	3.035.676.543

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah Kabupaten Sumenep antara lain :

Tantangan

- a. Melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Mudahnya menerima budaya asing yang belum tentu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia;
- c. Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan dan perbedaan status ekonomi;
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang Bela Negara;
- e. Kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan
- f. Masih rendahnya partisipasi politik, budaya dan etika politik dan kurangnya pemahaman tentang aturan perundangan yang berlaku;
- g. Adanya isu SARA yang berpotensi konflik;
- h. Kurangnya pemberdayaan umat beragama dalam bentuk kerukunan antar umat beragama maupun hubungan umat beragama dengan pemerintah;
- i. Kurangnya pemajuan dan penghormatan HAM;
- j. Belum tersedianya linmas dalam penanganan kebencanaan;

Analisa SWOT dan CSF

Organisasi terdiri bermacam-macam bagian yang saling berinteraksi dan bersinergi. Dengan demikian organisasi tidak akan terlepas dari lingkungannya sehingga mempengaruhi perkembangannya. Perkembangan organisasi, dipengaruhi oleh lingkungannya yang terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu : Strategi eksternal (peluang dan ancaman) dan Strategi Internal (kekuatan dan kelemahan).

Dalam menganalisa dan menyikapi pengaruh lingkungan tersebut dapat digunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), Analisis tersebut digunakan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur,

dalam mengatasi kelemahan dan menanggulangi ancaman, serta untuk memperkuat, meningkatkan dan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

a. Lingkungan Internal

1) Kekuatan (Strengths)

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- b) Adanya akses yang baik kepada infrastruktur politik dan suprastruktur politik.
- c) Adanya koordinasi yang baik antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep dengan SKPD/Instansi/Lembaga terkait.
- d) Kebijakan penyediaan anggaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep.
- e) Tersedianya SDM yang berkualitas dan tersedianya sarana prasarana.

2) Kelemahan (Weaknesses)

- a) Kurang jumlah personil
- b) Lemahnya Sistem Informasi Manajemen (SIM)
- c) Rendahnya sosialisasi tentang program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep
- d) Terdapat beberapa unit kegiatan yang belum dikenal masyarakat
- e) Rendahnya validitas data sebagai bahan perencanaan

b. Lingkungan Eksternal

1) Peluang (Opportunities)

- a) Partisipasi Parpol, Ormas, LSM, dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi
- b) Tuntutan masyarakat akan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman
- c) Tersedianya peraturan tentang Kominda, Panpel HAM, FKUB, orang Asing, dan Bantuan Keuangan Parpol.

2) Ancaman (Threats)

- a) Keraguan masyarakat terhadap kemungkinan masih adanya realita paradigma lama pemerintah dalam kehidupan politik.

- b) Munculnya kelompok-kelompok oportunis ambivalen yang memanfaatkan situasi politik dan ekonomi.
- c) Tingginya potensi konflik di masyarakat (horisontal, vertikal dan SARA)
- d) Rendahnya pemahaman masyarakat akan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- e) Tingginya pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara berbangsa dan bernegara.

Analisa Lingkungan Strategis

Untuk lebih jelasnya tentang Analisa Strategis dengan faktor SWOT dapat dilihat bahwa Analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE) dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan dengan menggunakan analisis SWOT. Dengan memperhatikan lingkungan strategis yang ada, strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi adalah :

- a. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan cara mendayagunakan kekuatan berupa dukungan kekuatan internal,
- b. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah atau mengatasi ancaman.
- c. Peningkatan peran seluruh komponen bangsa dalam penciptaan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman.
- d. Melakukan kegiatan yang menyentuh dan melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai wujud adanya perubahan paradigma.
- e. Melakukan sosialisasi program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep
- f. Membuat jejaring informasi dengan seluruh komponen masyarakat guna mengantisipasi adanya potensi kerawanan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Untuk lebih menjamin efektivitas dan manfaat dari berbagai program pembangunan yang dirumuskan tahun 2016-2021, salah satu langkah antisipatif yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dengan melalui serangkaian proses. Dimulai dari dirumuskan terlebih dahulu dengan menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Sumenep, lalu dikaitkan dengan isu global, nasional, regional, dan lokal.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep mempunyai beban tanggung jawab yang tidak maksimal hal ini disebabkan oleh :

A. Faktor Internal

1. Peluang

- Sistem otonomi daerah memungkinkan bagi upaya pengembangan program/kegiatan sesuai kebutuhan daerah ;
- Sumber pendanaan memberi kemungkinan bagi pengembangan program/ kegiatan;
- Kualitas pendidikan SDM yang mumpuni

2. Kelemahan

Dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Namun dengan pendanaan yang ada perlu dilakukan penyesuaian program kegiatan yang ada.

B. Faktor Eksternal

1. Peluang

- Respons masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah (OTODA) cukup positif;
- Hubungan kemitraan eksekutif-legislatif dan lembaga-lembaga masyarakat/LSM/Parpol cukup harmonis.

2. Kelemahan

- a. Kecenderungan melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Mudahnya menerima budaya asing yang belum tentu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia;
- c. Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan maupun perbedaan status ekonomi;
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bela negara serta kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- e. Masih belum adanya kontribusi yang maksimal dalam pembangunan keberadaan organisasi politik, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
- f. Masih adanya isu SARA yang berpotensi konflik
- g. Kurangnya pemberdayaan umat beragama dalam bentuk kerukunan antar umat beragama maupun hubungan umat beragama dengan pemerintah serta kurangnya pemajuan dan penghormatan HAM;
- h. Masih lemahnya penanganan bencana di Kabupaten Sumenep antara lain pengorganisasian serta sistem yang masih belum konsisten dan efektif, belum tersedianya tenaga trampil dalam bidang penanganan kebencanaan serta belum adanya data potensi masyarakat yang mempunyai kepedulian dan mampu menangani kebencanaan profesional.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan janji politik pada saat kampanye, visi kepala daerah terpilih adalah **“SUPER MANTAP”**

yaitu : ”Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan SUPER MANTAP seperti dimaksud di atas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas

Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.
2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan
3. Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi
4. Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Accountable.
5. Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.
6. Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Misi Pembangunan dimaksud dapat diuraikan penjelasannya pada Program prioritas, yaitu :

1. Peningkatan kualitas pendidikan
2. Optimalisasi pelayanan kesehatan gratis
3. Mencetak 5000 wirausahawan muda
4. Peningkatan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
5. Peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan
6. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional
7. Peningkatan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak
8. Mewujudkan desa sejahtera dan kota BERSERI
9. Peningkatan Profesionalisme dan inovasi birokrasi

Sedangkan tugas dan fungsi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Misi

1. Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.

Tujuan

1. Tujuan dari misi 5 (Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan) adalah “Meningkatkan Kualitas Nilai-Nilai Kehidupan Beragama dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sosial dan Perlindungan Masyarakat”;

Sasaran

1. Meningkatnya toleransi dan komunikasi antar umat beragama sebagai pengejawantahan dari Kesadaran Nilai-nilai Nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Indikator Kinerja

1. Prosentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan
2. Jumlah demo bersifat sosial
3. Prosentase kerukunan beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masyarakat
4. Prosentase peningkatan kemampuan potensi linmas dalam pengamanan lingkungan di masyarakat
5. Prosentase pemahaman tentang Hak Asasi Manusia
6. Prosentase pemantauan keberadaan organisasi masyarakat dan LSM
7. Prosentase kondisi stabilitas poleksosbud di Kabupaten Sumenep

3.3. Telaahan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten

3.3.1. Faktor-faktor Penghambat

- a. Persoalan Disintegrasi Bangsa masih merupakan ancaman yang perlu diwaspadai mengingat kemelut politik di Pusat akan dapat

- merembes ke bawah dan mempengaruhi lunturnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat;
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan Desentralisasi dan Demokrasi yang tidak terkendali sebagai akibat adanya perbedaan pemahaman;
 - c. Rendahnya kualitas SDM yang cukup rawan dan rentan terhadap upaya-upaya provokasi akibat kesenjangan sosial
 - d. Tuntutan pemerataan pembangunan antara masyarakat kepulauan dan daratan masih merupakan persoalan penting dalam rangka menghilangkan kesenjangan sebagai bagian dari upaya mendukung persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
 - f. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika
 - g. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, pengangguran, penularan virus HIV, dan lain-lain.
 - h. Masih sporadisnya konflik social (seperti : perburuhan, tani, nelayan, dll) yang berdampak mengganggu ketentraman masyarakat.

3.3.2. Faktor-faktor pendorong

- a. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat
- b. Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat Negara kebangsaan.
- c. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan terhadap latensi bahaya ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila
- d. Berperannya pemuka agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu penegakan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat.

- e. Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat dalam gejolak konflik.
- f. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku pelanggaran HAM dan KDRT yang mengisik rasa keadilan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pelaksanaan tupoksi dan program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep memberikan dukungan dalam penataan wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis hal ini disebabkan dalam tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Meperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di Kabupaten Sumenep, dapat dikemukakan beberapa isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep dimasa 5 (lima) tahun ke depan, antara lain :

1. Mengejalanya erosi nasionalisme dan semangat kebersamaan makin menghambat proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Lemahnya etika, moral dan budaya politik yang beradap dapat menghambat proses demokratisasi.
3. Konflik sosial, bencana, rasa aman, ketertiban masyarakat, penegakan hukum/HAM, terorisme, narkoba, proxy war, dan isu SARA merupakan ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara.

Oleh karenanya pendidikan politik, wawasan kebangsaan, demokratisasi, penegakan hukum/HAM dan kerukunan hidup dalam aspek IPOLEKSOSBUD perlu dikembangkan dan ditingkatkan melalui forum komunikasi, forum fasilitasi, forum silaturahmi, rapat koordinasi terpadu dan lain-lain berdasarkan pada etika hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan komitmen yang sama dari seluruh jajaran aparaturnya dan tokoh-tokoh masyarakat/agama agar kesadaran untuk menjaga kerukunan, toleransi, solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat

terus ditingkatkan guna tercapainya masyarakat Sumenep yang makin sejahtera sehingga dapat memperkuat kesadaran berbangsa dan bertanah air dalam wilayah NKRI.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pengertian tujuan menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dimaksud ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Hal ini penting, mengingat tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dalam rangka merealisasikan misi, maka tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat (terwujudnya kondisi masyarakat yang kondusif)
2. Meningkatkan toleransi dan komunikasi antar umat beragama sebagai pengejawantahan dari kesadaran nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
3. Meningkatkan kualitas warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan.

Tujuan yang ditetapkan dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran yaitu :

1. Prosentase penurunan kejadian pelanggaran terkait HAM dan SARA
2. Prosentase konflik sosial yang sudah ditangani dan diselesaikan
3. Jumlah Kegiatan penyelenggaraan forum antar umat beragama
4. Jumlah kegiatan bernilai kebangsaan dan nasionalisme
5. Jumlah kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat.

4.2. Strategi dan Kebijakan SKPD

Memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan Bupati Sumenep Tahun 2016-2021 serta Rencana Tata Ruang wilayah, maka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep, strategi dan kebijakan yang digunakan adalah :

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan toleransi dan komunikasi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Meningkatnya Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi Konflik	Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan kewaspadaan dini dan cegah dini terhadap timbulnya konflik sosial, bencana, terorisme, narkoba, proxy war, dan isu SARA yang merupakan ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara
	Meningkatnya Pendidikan Politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada Masyarakat	Meningkatkan wawasan kebangsaan untuk berperan aktif dalam proses pembangunan daerah dan Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya	Memfasilitasi silaturahmi dan komunikasi antar suku, etnis dan golongan serta pendidikan dan latihan bela Negara dalam rangka menanamkan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
13. Pameran Pembangunan

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan Mebelair
3. Pengadaan Komputer
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

7. Rehabilitasi Gedung Kantor
- C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 2. Pengadaan Pakaian Olahraga
 - D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - E. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 1. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
 2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
 3. Peningkatan Kesatuan dan Persatuan Bangsa
 4. Penguatan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Cinta Tanah Air, Kesadaran Berbela Negara dan Berkonstitusi
 - F. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 1. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan lainnya dalam upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
 2. Pentas Seni dan Budaya, Filsafat, Lomba Cipta dalam upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
 3. Peningkatan Forum Komunikasi Eksekutif-Legislatif Dalam Format Otonomi Daerah
 4. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
 5. Gelar Pasukan Satuan Linmas Dalam Rangka Pemilu
 - G. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
 1. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
 2. Kajian Strategis Ipoleksosbud Dalam Kominda
 3. Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini Dan Cegah Dini Terhadap Konflik di Masyarakat

H. Program Pendidikan Politik Masyarakat

1. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
2. Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden
4. Monitoring dan Evaluasi Organisasi Masyarakat dan LSM
5. Fasilitasi Penyaluran Dana Hibah Pemilu Kada
6. Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan LSM
7. Dukungan Kelancaran Pemilu
8. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pemahaman Etika dan Kultur Politik dalam Rangka Penerapan Budaya Politik yang Demokratis
9. Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan / Gender

5.2. Indikator Kinerja

Penetapan Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi terkait dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini ditujukan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

5.3. Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep, pemerintah, instansi terkait dan masyarakat. Sedangkan pendanaan indikatif diperoleh dari APBD.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep dalam perumusannya berdasarkan pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Malang Tahun 2016-2021. Sebagai review dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada rancangan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 dapat diuraikan dari misi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Sumenep yakni menciptakan masyarakat sumenep makin sejahtera. Berikut ini tabel yang menguraikan secara terperinci dari indikator kinerja yang mengacu pada sasaran RPJMD dari misi Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam rancangan RPJMD :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021
Meningkatnya Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi Konflik	Prosentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	92%	93%	94%	95%	95%
Meningkatnya Pendidikan Politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada Masyarakat	Persentase Masyarakat yang menggunakan Hak Pilih	17%	13%	10%	6%	2%

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat dengan harapan dapat diimplementasikan secara konsisten.

Sumenep, April 2016

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMENEP



M. H. KAFRAWI, S.Sos, M.Si

Pemula Utama Muda

NIP. 19581215 198003 1 015

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2015)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN (2021)	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatkan toleransi dan komunikasi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	1.1 Meningkatnya Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi Konflik	1.1.1 Prosentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	%	94%	93%	92%	93%	94%	95%	95%	Bakesbangpol
		1.2 Meningkatnya Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi Konflik	1.2.1 Persentase Masyarakat yang menggunakan Hak Pilih	%	18%	18%	17%	13%	10%	6%	2%	Bakesbangpol